

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan paradigma pemerintahan di berbagai negara telah mengalami pergeseran dari *rulling goverment* menuju *governance* dan pengembangan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan adil. Perubahan ini telah meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat, terutama instansi pemerintah, untuk selalu responsif terhadap tuntutan masyarakat. Hal ini tercermin dalam upaya pemerintahan untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan transparansi dan berakuntabilitas (Bastian, 2001). Salah satu tuntutan masyarakat adalah pemerintah menerapkan praktik keuangan yang sehat dalam rangka tata kelola yang baik, dalam hal ini berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah atas pengelolaan anggaran secara efisien dan efektif (Shara et al., 2020).

Proses penentuan penggunaan anggaran secara efisien dan efektif dapat diimplementasikan melalui penerapan anggaran berbasis kinerja, pendekatan ini difokuskan pada pencapaian *value for money*. Hal ini mencakup pertimbangan kinerja dalam pembuatan, penilaian, persetujuan, pengendalian pelaksanaan anggaran, termasuk ruang lingkup, hasil, dan kegunaannya. Selain itu, penentuan program dan kegiatan yang ditargetkan serta pendanaan yang tepat sasaran juga termasuk dalam pertimbangan ini (Mardiasmo, 2018).

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan sektor publik mencakup tiga komponen yang mendukung konsep *value for money*. Ekonomis adalah komponen utama dari konsep ini, yang merupakan proses memperoleh *input* dalam kuantitas dan kualitas tertentu dengan biaya terendah. Selain itu, ekonomis memperhitungkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya oleh organisasi sektor publik dan bagaimana mereka dapat menghindari pemborosan. Efisiensi merupakan komponen kedua. Efisiensi yaitu mencapai output tertentu dengan input terendah. Organisasi sektor publik berkinerja lebih baik ketika rasio efisiensinya lebih rendah, dan komponen ketiga dari konsep *value for money* yaitu efektivitas, efektivitas merujuk pada tercapainya hasil

program sesuai dengan target yang telah ditentukan. Organisasi dapat mencapai *value for money* ketika mampu meminimalisir biaya *input* untuk menghasilkan *output* maksimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Tujuan pemerintah sebagai lembaga sektor publik adalah memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang (Muthi'ah, 2019). Pemerintah dapat menggunakan konsep *value for money* dalam mencapai *good governance*, konsep ini memperkuat upaya pemerintah sebagai penghubung dalam mencapai tata kelola yang baik yang berarti pemerintah, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab, dan transparan (Laoli, 2019). Penerapan *good governance* dalam pengelolaan anggaran perlu adanya penerapan akuntabilitas publik, dalam hal ini berkaitan dengan setiap organisasi pemerintah daerah menerapkan transparansi atas perwujudan hak publik terhadap anggaran yang dikelola. Penerapan praktik akuntansi oleh instansi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan transparansi anggaran dengan tetap menjaga kualitas laporan kinerja instansi pemerintah, sehingga masyarakat sebagai pengguna publik dapat menilai akuntabilitas (Tran et al., 2022). Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tentu saja bergantung pada pengawasan yang efektif dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyelewengan, hambatan, pemborosan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Partisipasi dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi penetapan target anggaran sebagai bagian utama dari tanggung jawabnya. Selain itu, partisipasi ini diartikan sebagai proses di mana manajer pusat pertanggungjawaban ikut serta dalam penyusunan anggaran.

Standar penilaian efektivitas belanja oleh publik salah satunya yaitu tingkat penyerapan anggaran (Bastian, 2017). Tingginya tingkat penyerapan anggaran menunjukkan seberapa optimal kinerja belanja pada instansi pemerintah, dengan adanya alokasi dana yang cepat dalam pelayanan publik oleh instansi menunjukkan penyerapan anggaran yang baik. Mengutip dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Grobogan (Grobogan.go.id), penyerapan anggaran

APBD Kabupaten Grobogan tahun 2023 pada triwulan II masih rendah yaitu sebesar 43,71%, tingkat penyerapan anggaran yang rendah terdapat di PD Kabupaten Grobogan. Penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan bahwa PD belum sepenuhnya ekonomis, efisien, dan efektif dalam mengalokasikan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Putri, 2020). Permasalahan terkait dengan penyerapan anggaran rendah memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mengelola anggaran dengan lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam sistem pelaporan maupun penganggaran agar dapat memaksimalkan kinerja anggaran.

Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam perwujudan kinerja yang efektif dan efisien perlu memenuhi faktor akuntabilitas dan transparansi, hal ini dapat dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Laporan tersebut merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan. Setiap Perangkat Daerah (PD) diharapkan merencanakan langkah-langkah guna meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengevaluasi kinerja Kabupaten Grobogan terkait akuntabilitas dan transparansi selama tahun 2022. Hasil evaluasi menunjukkan Kabupaten Grobogan memperoleh nilai 63,27 atau predikat B (LKJiP, 2022). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Grobogan belum mencapai tingkat optimal. Pengawasan dalam pengelolaan anggaran perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran yang disusun sesuai dengan perencanaan. Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik diperlukan adanya partisipasi anggaran dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti masyarakat dan keterlibatan dari kepala PD dalam proses perencanaan, penyusunan strategi, dan pengelolaan anggaran.

Pengelolaan perencanaan dan anggaran oleh perangkat daerah Kabupaten Grobogan masih belum mencapai tingkat optimal, sehingga mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi, untuk menilai sejauh mana suksesnya suatu program kegiatan dilaksanakan, evaluasi kinerja menjadi penting untuk

menilai keberhasilan program kegiatan yang dilaksanakan serta tingkat layanan yang diberikan oleh pemerintah. Pengukuran kinerja harus memastikan bahwa alokasi dana yang diinvestasikan dalam pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan sebanding dengan hasil akhir. Oleh karena itu, pengawasan yang efisien dan partisipasi anggaran dalam perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan prinsip *value for money*.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, seperti yang ditemukan oleh Tarima (2022). Namun, Veronika (2023) menemukan bahwa secara positif akuntabilitas tidak mempengaruhi kinerja anggaran. Sementara itu, Suharyono (2019) menemukan adanya pengaruh positif transparansi terhadap kinerja anggaran, namun penelitian Laoli (2019) transparansi tidak mempengaruhi kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Purnomo (2018) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, sedangkan Johan (2020) menyatakan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran yang berkonsep *value for money*. Penelitian oleh Achmad (2020) menyimpulkan partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran.

Adanya kesenjangan penelitian dan inkonsistensi dalam hasil penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk mengkaji ulang variabel-variabel tersebut terhadap kinerja anggaran pada PD Kabupaten Grobogan dengan konsep *value for money*. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk membuat judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep *Value For Money* Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Grobogan”.

B. Rumusan Masalah

Penyerapan anggaran yang rendah di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum optimal dalam mencapai tujuan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dalam upaya mencapai kinerja yang efektif dan efisien, pemerintah Kabupaten Grobogan perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang dijelaskan dalam Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Evaluasi dari KemenPAN-RB Republik Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan predikat B sebesar 63,27 terkait akuntabilitas dan transparansi di Grobogan (LKJiP, 2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah akuntabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan?
2. Apakah transparansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan?
3. Apakah pengawasan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan?
4. Apakah partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Membuktikan dan menganalisis akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Membuktikan dan menganalisis transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
3. Membuktikan dan menganalisis pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
4. Membuktikan dan menganalisis partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *value for money* pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian ini dari dua aspek antara lain:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akademisi mengenai hubungan kinerja anggaran dengan konsep *value for money* dalam konteks tata kelola yang baik. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi para pengambil kebijakan dan praktisi dalam merancang dan menerapkan sistem tata kelola anggaran yang lebih baik.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dengan memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi instansi pemerintahan dalam meningkatkan kinerja anggaran di PD Kabupaten Grobogan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini adalah dalam pengumpulan informasi, sehingga penelitian terfokus pada hal-hal yang menjadi tujuan utama penelitian. Penelitian ini berfokus pada aspek akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi anggaran yang mempengaruhi kinerja anggaran pada Perangkat Daerah di Kabupaten Grobogan tahun 2022-2023.